

# **PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PENGAJUAN REVISI DIPA**

**OLEH: ANWAR, S.PdI, M.PdI**

## **ABSTRAK**

Tahapan dan proses perencanaan anggaran pada prinsipnya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran itu sendiri sebagaimana yang sudah ditetapkan pengelolaannya oleh pemerintah. Adanya perencanaan anggaran yang dilakukan dengan tepat dan matang akan membentuk adanya pelaksanaan yang baik pula. Adanya pelaksanaan penganggaran yang dilakukan dengan baik akan membantu terciptanya laporan yang berkualitas. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja menjadi sebuah upaya yang penting untuk meminimalisir terjadinya revisi DIPA. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kepustakaan dimana peneliti mengumpulkan sumber sumber terkait dan membahasnya menjadi sebuah gambaran yang utuh.

Kualitas perencanaan anggaran dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kuantitas pengajuan revisi DIPA. Adanya peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah akan bisa dijadikan sebagai upaya yang baik dalam meminimalisir revisi DIPA yang dilakukan pada tahun berjalan. Untuk itu maka perlu adanya perubahan sistem perencanaan anggaran yang perlu dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan anggaran yang sudah ditetapkan.

**Keyword: Kualitas Perencanaan Anggaran, Minimalisir Revisi DIPA**

## **A. PENDAHULUAN**

Anggaran menjadi sebuah hal yang penting dalam laju perjalanan pengelolaan pemerintahan dari waktu ke waktu. Adanya perencanaan anggaran yang dilakukan dengan tepat akan membantu pengalokasian dana yang lebih tepat sasaran. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam sistem pemerintahan yang pastinya perlu dijalankan saat ini. Anggaran sendiri merupakan sebuah pernyataan yang terkait dengan adanya estimasi kinerja yang nantinya hendak dicapai dalam periode tertentu yang sudah

ditetapkan. Adanya perencanaan penganggaran tentunya dituangkan dalam bentuk finansial dengan pengelolaan yang tepat.

Didalam konstruksi APBN sendiri, belanja pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan nasional akan bisa didapatkan dengan adanya pembelanjaan yang tepat sasaran. Itu artinya pengalokasian dana perlu dilakukan sesuai dengan tujuan dan juga maksud dari penganggaran yang dilakukan tentunya. Adanya anggaran yang berkualitas tentu akan bisa mendukung peningkatan serta pemeliharaan kesejahteraan rakyat secara maksimal. Ini menjadi sebuah point penting yang pastinya perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini.

Pemerintah dalam perencanaan anggaran yang dilakukan tentunya akan sangat berpengaruh pada adanya pengalokasian dana yang dijalankan. Sumber daya dalam perekonomian tentunya akan sangat berpegangan pada adanya perencanaan anggaran yang tepat dilakukan. Saat pemerintah tidak dapat melakukan perencanaan penganggaran dengan tepat maka akan muncul beragam dampak bagi perekonomian nasional. Dimana nantinya akan terjadi ketidakmerataan penyerapan anggaran nasional yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat benar benar memaksimalkan perencanaan anggaran untuk bisa terealisasi dalam pelaksanaan yang nyata.

Seftianova (2013) menyatakan bahwa dengan adanya penyerapan anggaran yang buruk akan sangat berdampak pada laju perjalanan perekonomian nasional. Ini berkaitan dengan adanya ketidakmerataan penyerapan anggaran yang bisa saja menimbulkan masalah baru di masa mendatang. Ada banyak sekali dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya ketidakmerataan penyerapan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Pertama, pada tidak lagi berjalannya fungsi dari kebijakan fiskal dalam upaya untuk melakukan pertumbuhan ekonomi secara efektif. Kedua, akan hilang manfaat belanja dikarenakan adanya dana yang dialokasikan tidak semua bisa dimanfaatkan dengan baik dalam upaya pembangunan. Ketiga, akan terjadi kelambatan dalam pelaksanaan program pemerintah yang terkait dengan adanya penanggulangan kemiskinan dan pastinya akan terjadi penumpukan tagihan disetiap akhir tahun yang pastiya tidak menyehatkan bagi masyarakat.

Masalah yang seringkali terjadi didalam perencanaan penganggaran sendiri adalah pada adanya pemikiran bahwa tidak semua anggaran yang diajukan disetujui. Padahal, anggaran yang diajukan nantinya akan disesuaikan dengan program kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Adanya penerapan anggaran yang dilakukan secara tradisional memang seringkali menimbulkan dampak yang signifikan. Sebab, kebanyakan perencanaan anggaran berpedoman pada penganggaran ditahun sebelumnya, sehingga tidak efektif jika digunakan pada tahun selanjutnya. Adanya perencanaan anggaran yang tidak matang tentu akan sangat berpengaruh terhadap dokumen pelaksanaan anggaran yang dilakukan atau sering disebut sebagai DIPA. DIPA sendiri merupakan sebuah dokumen dari pelaksanaan penganggaran yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban pengalokasian dana anggaran.

Namun, dalam kenyataannya masih ada banyak sekali pemerintahan yang masih menggunakan sistem penganggaran secara tradisional. Hal ini pastinya akan sangat berdampak pada revisi DIPA yang nantinya harus dilakukan karena tidak akan semua perencanaan bisa terealisasi. Untuk itu maka perlu adanya perubahan pada kualitas perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga dokumen pelaksanaan anggaran bisa terbentuk dengan bagus dan dapat meminimalisir adanya revisi DIPA. Yudhiyanto (2011) menyatakan bahwa pada dasarnya semakin baik adanya perencanaan penganggaran yang diterapkan maka akan meningkatkan kualitas penyerapan alokasi dana yang dilakukan. Sehingga hasil akhir dari pelaksanaan tersebut akan dimuat secara komperhensif didalam muatan dokumen pelaksanaan anggaran atau disebut sebagai DIPA.

Pada dasarnya kualitas dari perencanaan anggaran sendiri menjadi sebuah hal yang penting untuk dibuat dengan pertimbangan yang matang. Karena pada pelaksanaannya akan berdampak langsung pada adanya kesejahteraan masyarakat yang nantinya pasti didapatkan. Sebab, seperti yang sudah dipahami bersama bahwa kesejahteraan masyarakat menduduki kebutuhan paling atas dibandingkan yang lainnya. Untuk itulah maka penting bagi setiap orang di pemerintahan saat ini agar benar benar memperhatikan kualitas dari perencanaan yang dilakukan. Tentu dalam hal ini perencanaan anggaran berbasis pada kinerja dinilai memiliki dampak positif pada penyerapan anggaran yang dialokasikan.

Anggaran berbasis kinerja sendiri menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan pelaksanaan anggaran yang dilakukan. Sebab, didalam perencanaan nantinya semua alokasi dana yang direncanakan akan disesuaikan

dengan hasil akhir yang diharapkan dalam pelaksanaannya. Sehingga tidak terjadi adanya ketidakmerataan penyerapan anggaran dana atau tidak diserapnya dana yang sudah dialokasikan tersebut. Ini akan berpengaruh secara signifikan pada peningkatan kualitas pembentukan dokumen pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Perencanaan kas pada dasarnya menjadi sebuah hal yang sangatlah penting didalam rangka melakukan pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang sifatnya terbatas. Sehingga kemudian pemanfaatan dari anggaran dana yang sudah dianggarkan oleh Negara dapat dilaksanakan secara efisien serta juga bisa memiliki nilai tambah. Kegiatan perencanaan kas sendiri juga pada dasarnya menjadi sebuah strategi manajemen kas yang dilakukan untuk memenuhi pembayaran kewajiban Negara sebagai bentuk dari pelaksanaan APBN. Adanya pelaksanaan anggaran yang dilakukan secara maksimal dan juga baik tentu akan memberikan dampak positif pada pembentukan dokumen pelaksanaan anggaran atau DIPA.

Penelitian ini penting dilakukan agar nantinya bisa dijabarkan dengan lebih maksimal terkait dengan pengaruh dari kualitas perencanaan anggaran terhadap revisi dipa. Sehingga dari adanya peningkatan kualitas perencanaan Anggaran sendiri maka revisi DIPA dapat diminimalisir dengan baik. Dengan begitu maka peneliti ingin meneliti lebih jauh lagi terkait dengan “Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran Dalam Upaya Meminimalisir Revisi DIPA”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk bisa menggambarkan lebih jauh lagi bagaimana peningkatan kualitas perencanaan anggaran dapat menjadi sebuah upaya untuk meminimalisir revisi DIPA. Sehingga pihak pihak terkait dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber yang dapat menambah wawasan terkait dengan perencanaan anggaran itu sendiri.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada dasarnya merupakan sebuah penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan adalah sebuah metode penelitian dengan cara mengumpulkan beragam teori yang relevan dengan penelitian yang dibahas. Masalah masalah penelitian tentunya bersifat universal dan dapat diselesaikan dengan tinjauan kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti. Masalah yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah “Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran Dalam Upaya Meminimalisir Revisi DIPA”.

Sugiyono (2010) menyatakan bahwa studi kepustakaan atau library research sendiri adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen terkait. Dokumen yang dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan masalah penelitian tentu dapat diambil melalui buku, jurnal, ataupun artikel yang membantu. Bahan-bahan pustaka yang relevan tentunya akan membantu peneliti untuk dapat menggambarkan masalah penelitian dengan lebih jelas. Sumber-sumber lainnya yang relevan tentunya dapat dijadikan sebagai bahan dalam membuat tulisan ilmiah ini.

Penelitian ini bersifat sistematis karena menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara runtun dan terarah. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah mencari bahan-bahan dari sumber data yang tersedia. Terdapat dua sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini dengan baik yaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber sekunder sendiri merupakan pokok bahasan yang menjadi inti dari permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini. Sedangkan, sumber sekunder sendiri adalah beragam informasi yang dapat membantu peneliti menguraikan permasalahan dengan baik. Artinya, sumber sekunder sendiri merupakan bahan-bahan yang memiliki keterkaitan dengan data primer yang dibutuhkan oleh peneliti.

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah menguji kebenaran dari masalah yang dibahas dalam penelitian. Pengujian kebenaran dari permasalahan peneliti tentunya dapat dibuktikan dengan mengumpulkan beragam sumber data yang terkait. Sehingga peneliti akan lebih mudah dalam memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai pembahasan tentang “Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran Dalam Upaya Meminimalisir Revisi DIPA”. Pertama tentu peneliti akan menentukan desain penelitian dengan tepat, kemudian akan dilakukan pencarian data pokok atau bisa dikatakan sebagai data primer, setelah itu akan dilakukan pencarian pengetahuan kontekstual yang menguatkan permasalahan dalam penelitian tentunya.

## **C. PEMBAHASAN**

### **a. Kualitas DIPA**

Pengelolaan keuangan instansi pemerintah pada dasarnya harus dilakukan dengan adanya persiapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja dalam mencapai fungsi, program, dan juga kegiatan guna mencapai sasaran dan rencana penarikan dana didalam tiap sub-sub satuan kerja dan juga pendapatan yang sudah diperkirakan sebelumnya. DIPA

sendiri merupakan singkatan dari daftar isian pelaksanaan anggaran yang merupakan sebuah dokumen dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan. DIPA sendiri pada dasarnya merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran yang sudah disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Lebih lanjut Siswanto (2010) menyebutkan bahwa DIPA adalah sebuah hasil dari transporfansi dari adanya dokumen perencanaan anggaran atau RKA-KL yang pastinya dibuat oleh Kementerian Negara. Apabila nantinya didalam pelaksanaannya terdapat pertimbangan pertimbangan lanjutan terkait dengan DIPA maka akan direvisi. Pertimbangan tersebut biasanya terjadi apabila adanya perubahan program, perubahan jenis belanja, dan masih banyak lagi yang lainnya. Perubahan tersebut terjadi apabila adanya berbagai macam perencanaan sebelumnya yang sudah dilakukan tidak matang.

Mashudi (2013) menyatakan bahwa dasar hukum dari adanya revisi DIPA yang dilakukan tersebut adalah peraturan dari Menteri Keuangan. Selain itu petunjuk teknis atas adanya revisi DIPA adalah pada adanya peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang pastinya akan berbeda beda didalam tiap tahunnya. Pada dasarnya DIPA sendiri berlaku selama satu tahun masa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan anggaran yang sudah dilakukan. DIPA sendiri berfungsi untuk dapat dijadikan sebagai dasar dari adanya pelaksanaan kegiatan dan juga penggunaan dari anggaran. DIPA sendiri juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengendalian, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan juga dijadikan sebagai perangkat akuntansi pemerintah.

Didalam sebuah DIPA tentunya ada pagu yang memiliki fungsi sebagai dasar untuk menerapkan batasan pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Pelaksanaan pagu DIPA sendiri pada dasarnya harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan adanya peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Kualitas DIPA sendiri pada dasarnya sangatlah berkaitan dengan adanya perencanaan anggaran yang sebelumnya sudah ditetapkan (Seftianova, 2013). Semakin baik kualitas dari perencanaan anggaran yang dilakukan maka akan meningkatkan kualitas DIPA yang dibuat oleh pemerintah.

DIPA yang berkualitas tentu perlu memenuhi beragam kriteria yang sesuai dan menunjukkan kualitasnya dengan baik. Pertama, Ketepatan waktu dalam menerima DIPA sendiri menjadi tolok ukur dari kualitas yang ada didalamnya. Kedua, sebuah DIPA dianggap berkualitas apabila isi didalamnya tidak ada kesalahan sama sekali dalam

pembuatan yang dilaksanakan. Ketiga, DIPA dianggap berkualitas apabila tidak diperlukannya revisi isi didalam DIPA yang sudah ditetapkan tersebut tentunya. Keempat, Tidak adanya tanda bintang didalam DIPA yang sudah dibuat oleh pemerintahan, karena tanda bintang sendiri diberikan apabila perlu adanya revisi atas isi didalam DIPA yang dibuat tersebut.

Sebuah DIPA yang berkualitas pada dasarnya merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang bebas dari adanya revisi. Ini berarti tidak ada yang perlu diperbaiki dalam dokumen DIPA yang dilakukan oleh pemerintah. Minimalisir revisi DIPA menjadi sebuah hal yang sangatlah penting dan perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini. Salah satu yang pastinya berpengaruh pada kualitas DIPA adalah pada perencanaan anggaran yang sebelumnya sudah dibuat. Adanya peningkatan kualitas perencanaan anggaran sendiri bisa dijadikan sebagai salah satu upaya untuk bisa meminimalisir revisi DIPA.

#### **b. Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Sebuah Solusi**

Kualitas perencanaan anggaran sendiri pada dasarnya dapat berpengaruh pada tingkat revisi DIPA yang perlu dilakukan nantinya. Semakin baik perencanaan anggaran yang disusun atas adanya pertimbangan yang matang maka akan lebih minim revisi DIPA yang perlu dilakukan. Selama ini anggaran dilakukan secara tradisional, artinya semua perencanaan anggaran masih berdasarkan pada pedoman pelaksanaan di tahun sebelumnya. Ini menjadi sebuah hal yang pada dasarnya berdampak pada kualitas pelaksanaan ditahun selanjutnya dengan adanya perencanaan anggaran yang sama. Sehingga tingkat kualitas perencanaan tidaklah secara signifikan menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyerapan anggaran yang perlu dilakukan.

Pemerintah perlu untuk melakukan perencanaan anggaran berbasis kinerja sebagai sebuah perbaikan sistem manajemen keuangan yang penting dilakukan oleh pemerintah. Haryanto (2007) menyatakan bahwa pada dasarnya anggaran berbasis kinerja sendiri adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada adanya output organisasi dan juga berkaitan erat dengan adanya visi, misi, serta rencana strategis organisasi sehingga nantinya dapat memberikan informasi terkait dengan adanya efektivitas serta efisiensi dari anggaran.

Selanjutnya, bastian (2006) menyatakan bahwa sistem anggaran berbasis pada kinerja sendiri merupakan sebuah sistem yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan

penyusunan program dan juga tolok ukur kinerja sebagai sebuah instrument untuk bisa mencapai tujuan serta sasaran program yang diharapkan didalam pelaksanaannya. Penerapan sistem anggaran yang berbasis pada kinerja dalam penyusunan program anggaran yang dimulai dengan adanya perumusan serta penyusunan struktur organisasi pemerintahan yang sesuai dengan adanya program yang akan dijalankan tentunya. Prinsip dari anggaran berbasis kinerja sendiri adalah menghubungkan antara anggaran Negara (pengeluaran Negara) dengan hasil yang nantinya diinginkan (output dan juga outcome). Sehingga setiap pengeluaran dana yang dilakukan nantinya dapat dipertanggung jawabkan kemanfaatannya.

Halim dalam Decky (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip dasar dalam penerapan sistem anggaran berbasis kinerja. Pertama, perlu adanya transparansi serta akuntabilitas anggaran yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Anggaran pada dasarnya harus dapat menyajikan adanya informasi yang jelas terkait dengan tujuan, sasaran, hasil, dan juga manfaat yang diperoleh oleh masyarakat untuk memiliki hak akses yang sama terhadap informasi penyerapan dana anggaran yang ada. Kedua, perlu adanya disiplin anggaran yang berarti bahwa pendapatan yang direncanakan merupakan sebuah perkiraan yang matang dan terukur secara rasional untuk dapat dicapai untuk semua sumber pendapatan yang tersedia. Ketiga, perlu adanya keadilan anggaran yang berkaitan dengan pengalokasian dana anggaran yang perlu dilakukan secara adil dan terukur. Keempat, efisiensi dan efektivitas anggaran pada dasarnya menjadi sebuah hal yang penting sebagai prinsip dasar pelaksanaan anggaran berbasis pada kinerja. Kelima, perencanaan anggaran berbasis kinerja tentunya perlu dibuat dan disusun dengan adanya pendekatan kinerja yang perlu dilakukan.

Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja yang baik tentunya akan membantu pemerintah untuk melaksanakan penyerapan dana dengan baik. Adanya penyerapan dana yang maksimal akan membantu pemerintah untuk bisa menciptakan kualitas DIPA yang baik. Sehingga nantinya revisi DIPA bisa diminimalisir dengan baik dari adanya perencanaan anggaran yang dilakukan dengan baik tentunya. Dengan begitu maka sangat penting agar dilakukan perencanaan anggaran dengan maksimal demi menciptakan pelaksanaan program yang lebih optimal. Sehingga akan berpengaruh baik pada adanya pembuatan DIPA sebagai dokumen pelaksanaan anggaran yang perlu dilakukan.



#### **D. KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang sudah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas perencanaan anggaran dapat berpengaruh secara signifikan terhadap revisi DIPA. Adanya peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah akan bisa dijadikan sebagai upaya yang baik dalam meminimalisir revisi DIPA yang dilakukan oleh satuan kerja tentunya. Untuk itu maka perlu adanya perubahan sistem perencanaan anggaran yang perlu dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan anggaran yang sudah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2006). *Akutansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Decky, F. A. (2014). Skripsi. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja ( Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu)*. Jurusan Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
- Mashudi, A. N. (2013). *Analisis Faktor Faktor Yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN Di Akhir Tahun (Studi Kasus di KPPN Malang)*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya.
- Seftianova, Ratih. (2013). *Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Sektor Wilayah KPPN Malang*. Jrak Vol. 4 No. 1 Februari 2013.
- Siswanto, A. D. (2010). *Faktor Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementrian/ Lembaga TA 2010*. Online : <http://www.fiskal.depkeu.go.id>
- Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.